



PERANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HUKUM

Kadek Frediandrika Adnantara

Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Denpasar

Email: frediandrikastrong@gmail.com

Abstract

The right to legal aid is a human right that conflicts with the law. Legal Aid is a form of access to justice for those affected by legal sanctions. Access to legal aid is also a perversion of equality before the law. Access to legal aid is a human right, especially for underprivileged communities. In this context, Legal Aid centers play an important role in fighting for the rights of the poor and underprivileged, improving their access to the justice system and other legal services. This research will provide knowledge about the role of legal aid centers for the poor and underprivileged. This type of research is normative legal research, answering research questions through empirical support of the Legislation method and analytical methods. The Legal Aid Center has an important role in the application of Law in Court, especially in assisting and/or exercising its authority at the Investigation and Prosecution level, as well as in the Trial Review process until the completion of the case. the case or the judge's final decision.

Keywords: Legal Aid role, handling legal issues

Abstrak

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang berkonflik dengan hukum. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang terkena sanksi hukum. Akses terhadap bantuan hukum juga merupakan penyimpangan kesetaraan di hadapan hukum. Akses terhadap bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Dalam konteks ini, pusat Bantuan Hukum berperan penting dalam memperjuangkan hak – hak masyarakat mampu dan tidak mampu, meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang peran pusat bantuan hukum bagi masyarakat mampu dan tidak mampu. Jenis penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif menjawab pertanyaan penelitian melalui dukungan empiris dari metode Perundang – Undangan dan metode analitis. Pusat Bantuan Hukum mempunyai peranan penting dalam penerapan Hukum di Pengadilan, khususnya dalam membantu dan/atau menjalankan kewenangannya pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan, serta pada proses Peninjauan Kembali Persidangan hingga selesainya perkara. perkara atau keputusan akhir hakim.

Kata Kunci: Peran Bantuan Hukum, menangani permasalahan hukum

A. Pendahuluan

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang berkonflik dengan hukum. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang terkena sanksi hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan wujud kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 28D(1) Konstitusi Negara menganut prinsip persamaan di depan hukum. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Permasalahan ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Bambang Sutiyoso mengatakan, standar tersebut

bermakna bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adalah urat nadi seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, pesan yang ingin kami sampaikan adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma – norma hukum. Pusat Bantuan Hukum (PBH) adalah organisasi yang didedikasikan pada profesi hukum, memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mampu dan tidak mampu, termasuk mereka yang kesulitan atau tidak mampu, baik yang mampu maupun tidak mampu. . Untuk membayar biaya pengacara atau biaya administrasi proses hukum. PBH berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat kurang beruntung dan terpinggirkan serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. PBH berperan penting dalam menghubungkan sistem peradilan.

PBH memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat antara lain pendampingan proses hukum, nasihat hukum, penyelesaian

¹ Undang – Undang Dasar 1945

sengketa secara damai dan pendidikan hukum. Dengan cara ini, baik kelompok yang berkemampuan maupun kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan dapat memperoleh hak – hak yang diabaikan atau ditekan oleh pihak yang lebih kuat. Selain memberikan layanan bantuan hukum, PBH berperan dalam advokasi dan reformasi kebijakan. PBH mengupayakan kebijakan yang lebih inklusif dan mengutamakan kepentingan masyarakat kurang mampu. PBH juga melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak – haknya dan meningkatkan akses terhadap layanan hukum. Dalam konteks ini, PBH berperan penting dalam memperjuangkan hak – hak kelompok rentan dan meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan² dan layanan hukum lainnya. PBH tidak hanya memberikan bantuan hukum langsung kepada masyarakat tidak mampu, namun juga memberikan

pelatihan dan pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan pembelaan diri.

Selain itu, PBH bekerja sama dengan organisasi lain, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan. Dengan memberikan bantuan hukum, PBH juga berupaya menghindari diskriminasi dan mengupayakan keadilan yang adil dan setara bagi setiap orang tanpa kecuali. Hal ini mencakup orang-orang yang mengalami diskriminasi karena gender, agama, ras atau orientasi seksual. PBH juga berperan penting dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk kelompok rentan. PBH dapat memberikan bantuan hukum dan advokasi dalam kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan dalam rumah

²Benny riyanto, “Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

11 dalam rangka perluasan akses keadilan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas”, Jakarta 2019.

tangga, diskriminasi atau pelanggaran hak ketenagakerjaan.

PBH juga berperan dalam meningkatkan akses terhadap sistem peradilan dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Kebanyakan masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan tidak memiliki akses terhadap sistem peradilan karena keterbatasan keuangan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Misi PBH adalah menyediakan layanan hukum yang mudah diakses dan terjangkau bagi mereka yang membutuhkan.

Selain memberikan bantuan hukum secara langsung, PBH juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak – haknya. Hal ini dicapai melalui berbagai kegiatan, seperti nasihat hukum, acara sosial atau publikasi informasi hukum publik.

Dengan menyadarkan masyarakat akan hak – haknya, diharapkan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

memperjuangkan haknya dan mengakses sistem peradilan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis terkait bantuan hukum³ bagi kelompok rentan agar dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang peran lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan melalui penyusunan pedoman hukum dan penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Selain itu, PBH bekerja sama dengan organisasi lain, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dengan memberikan bantuan hukum, PBH juga bertujuan untuk menghindari diskriminasi dan mengupayakan keadilan yang adil dan setara bagi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini mencakup orang-

³ Buyung Adnan. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1982

orang yang mengalami diskriminasi karena gender, agama, ras, atau orientasi seksual. PBH juga berperan penting dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk kelompok rentan. PBH dapat memberikan bantuan hukum dan advokasi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara – cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris – normatif yaitu melakukan penelitian lapangan, melihat secara langsung dan melakukan wawancara kepada pihak terkait, responden,

disamping itu melakukan penelitian peraturan perundang – undangan, peraturan terkait, literatur – literatur

Adapun penulis lakukan secara yuridis sosiologis, yaitu memadukan antara peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan kenyataan – kenyataan yang ada di masyarakat, peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pusat Bantuan Hukum perisai dharmawangsa.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interpretasi hukum dan kontruksi hukum yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah data analisis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal – hal bersifat umum, atau kemudian generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Pembahasan

a. peranan paralegal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ada dua yaitu yang pertama mengenai pentingnya paralegal dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, dan yang kedua mengenai bagaimana paralegal membantu masyarakat yang membutuhkan dalam hal bantuan hukum. akses terhadap sistem keadilan bagi masyarakat kurang mampu seringkali terbatas karena terkendala oleh biaya dan kurangnya pengetahuan hukum⁴. Inilah di mana paralegal memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum pengganti atau bantuan hukum minimal untuk orang – orang dengan pendapatan rendah yang tidak mampu membayar biaya pengacara pribadi. Paralegal memiliki pengetahuan hukum dasar dan dapat memberi tahu masyarakat tentang hak

mereka dan prosedur hukum yang harus mereka ikuti. Ada banyak jenis bantuan hukum yang dapat diberikan oleh paralegal kepada masyarakat tidak mampu, seperti memberikan konsultasi hukum, persiapan dokumen hukum, dan mewakili klien dalam sidang sederhana.

Paralegal juga membantu masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum ketika mereka menghadapi kasus hukum yang cukup kompleks. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkan mereka ke Pengacara/Advokat yang bersedia memberikan Bantuan Hukum⁵ secara pro – bono atau atas biaya yang terjangkau. Selain itu, paralegal juga dapat membantu masyarakat dalam memahami dokumen hukum yang mereka terima, seperti salinan surat kabar dan menjelaskan konsekuensi dari tindakan mereka atau hak – hak mereka. Sementara memberikan bantuan hukum, paralegal juga dapat melakukan advokasi untuk

⁴ Denny Nurkertamanda, dadan rahmat hidayat, dan husni thamrin, 2020. Peran Lembaga bantuan hukum dan mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.

⁵ IGN. Ridwan Widyadharma, professional hukum dalam pemberian bantuan hukum (badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2010)

masyarakat kurang mampu terutama dalam hal mengenai keadilan sosial atau masalah hak asasi manusia. Mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye sosial, mengorganisir demonstrasi, dan melakukan advokasi untuk meningkatkan aksesibilitas orang-orang terhadap sistem keadilan dan perlindungan hukum. Dengan melakukan semua ini, paralegal membantu masyarakat tidak mampu untuk meraih keadilan dalam kehidupan mereka.

Melalui memberikan bantuan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis, paralegal berperan menjembatani kesenjangan hukum dengan memberikan akses keadilan bagi orang-orang yang kurang mampu. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan kebijakan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih adil untuk masyarakat. Namun, tugas paralegal tidak mudah. Paralegal harus memperoleh pengetahuan hukum yang luas, memahami dinamika sosial, dan selalu menggunakan prinsip etika yang baik dalam setiap tahapan pekerjaannya. dalam membantu masyarakat tidak mampu, paralegal

harus menjaga kemandirian klien, menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam memberikan bantuan hukum.

Paralegal biasanya dikaitkan dengan litigasi, yang melibatkan penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan. Namun, mereka juga memainkan peran penting dalam hukum transaksional, yang melibatkan tindakan hukum yang tidak perlu pergi ke pengadilan. Paralegal yang bekerja dalam hukum perusahaan, misalnya, membantu pengacara dalam menyusun draft, melakukan uji tuntas dalam merger dan akuisisi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam hukum, paralegal membantu pengacara menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum, Mereka juga memberikan dukungan kepada pengacara yang bekerja dalam perencanaan.

Bidang penting lainnya di mana paralegal memainkan peran penting adalah di bidang hukum pidana. Paralegal membantu pengacara dalam melakukan

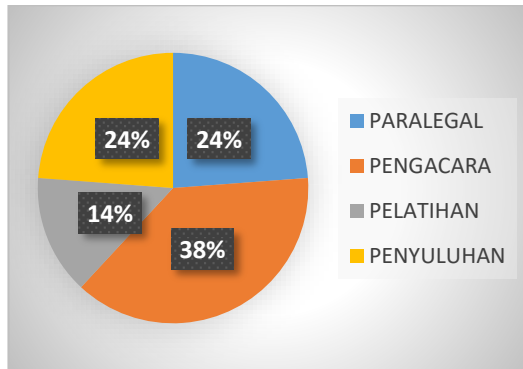
penelitian, menyusun dokumen hukum, seperti pembelaan dan mosi, dan berkomunikasi dengan klien. Mereka juga berperan dalam menyelidiki kasus, mewawancarai saksi, dan meninjau bukti. Selain tanggung jawab beragam yang mereka miliki, paralegal juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Dengan menangani banyak tugas rutin, paralegal membebaskan waktu pengacara, memungkinkan mereka untuk fokus pada masalah hukum yang lebih kompleks. Selain itu, paralegal seringkali dapat menyelesaikan tugas lebih efisien daripada pengacara, yang membantu meningkatkan hasil kerja oleh klien.

Selain itu, paralegal juga memainkan peran yang semakin penting dalam sistem peradilan di luar hanya mendukung pengacara. Mereka dapat memberikan layanan bantuan hukum, membantu mereka yang tidak

mampu membayar pengacara menavigasi sistem hukum. Dengan cara ini, paralegal membantu memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari status sosial ekonomi⁶. Penting untuk diketahui bahwa peran paralegal telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka secara historis dipandang sebagai "pembantu" bagi pengacara, mereka sekarang memainkan peran yang jauh lebih luas dalam sistem hukum. Mereka membantu dengan tugas-tugas mulai dari penelitian hukum hingga menyusun dokumen hukum untuk mewawancarai klien dan saksi. Mereka juga memberikan dukungan kepada mereka yang tidak mampu membayar pengacara, berkontribusi pada kelancaran operasi sistem peradilan, dan membantu mencapai hasil yang adil bagi klien.

⁶ Raharjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010.

Tabel. 1 kinerja Paralegal dan Pengacara di Perisai Dharmawangsa⁷



Terkait dengan bantuan hukum, bantuan hukum tidak boleh hanya menjadi hak prerogatif bagi mereka yang mempunyai cukup uang dan kekuasaan untuk memanfaatkan sistem hukum. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi mereka yang mampu⁸. Padahal bantuan hukum harus tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan tanpa diskriminasi.

Maka kemudian akan membahas pentingnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, memiliki akses terhadap bantuan hukum⁹.

Akses terhadap bantuan hukum adalah hak setiap orang. Seringkali masyarakat yang lebih merasakan pentingnya bantuan hukum adalah mereka yang lebih membutuhkan bantuan hukum namun tidak mampu membayar. Kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat penting untuk menjamin terwujudnya hak-hak kelompok rentan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan dana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya untuk menangani kasus hukumnya. Selain itu, masyarakat dapat memberikan dukungan dan bantuan moral melalui penggalangan dana atau keterampilan praktis lainnya.

⁷ I Gusti Putu Budiadnyana, Dharmawangsa Law Firm & Partners, Bagian Managing Partners

⁸ Hendarman supandji, 2017. Tantangan dan peran Lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Jurnal hukum & pembangunan, 47(3), 429 – 445

⁹ Jaka triyana dan kuncoro, A. S. 2018. Akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui Lembaga bantuan hukum. Yustisia Jurnal Hukum, 7(3), 369 – 384

Namun pada kenyataannya, akses terhadap bantuan hukum masih menjadi hal yang sulit dicapai oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Banyak faktor yang menjadi kendala, seperti kurangnya informasi mengenai cara memperoleh bantuan hukum, mahalnya biaya penggunaan bantuan hukum, dan rendahnya profesionalisme pengacara dan pejabat hukum lainnya.

Penanggulangan permasalahan bantuan hukum dimulai dengan meningkatkan kualitas informasi yang dimiliki masyarakat mengenai mekanisme memperoleh bantuan hukum, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan hukum, dan hak-hak yang dimilikinya. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan acara pendidikan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang

manfaat dan metode memperoleh bantuan hukum.

Pemerintah dan instansi terkait juga perlu bekerja sama untuk mengurangi biaya dalam mengakses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan. Langkah ini dapat dicapai melalui alokasi dana yang proporsional dan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, para pemangku kepentingan juga perlu menyepakati pentingnya akses bantuan hukum yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat¹⁰.

Selain itu, pengacara dan tenaga hukum lainnya juga perlu dinilai sebagai entitas kunci dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam kasus seperti ini, pengacara perlu meyakinkan kliennya bahwa kesulitan pembayaran tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memperjuangkan hak-hak mereka

¹⁰ Muhlizi, Arfan Faiz. Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Non Litigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informasi Bagi Masyarakat Adat 8(1) 2013

dalam sistem hukum. Selain itu, kebijakan biaya yang diterapkan oleh pengacara harus disesuaikan dengan kelas sosial klien yang diwakilinya.

Teknologi yang ada juga bisa dimanfaatkan untuk membuka akses terhadap bantuan hukum. Salah satu caranya adalah dengan meluncurkan layanan bantuan hukum online. Hal ini membantu masyarakat mendapatkan bantuan hukum tanpa harus pergi ke firma hukum terdekat. Terdapat konsultasi online melalui video call dan aplikasi yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

b. penanganan bantuan hukum terhadap masyarakat dalam permasalahan hukum yang dihadapi

Untuk menjamin akses bantuan hukum yang mudah dan terjangkau, semua pihak perlu bekerja sama dan berkolaborasi. Pemerintah, pengacara, lembaga terkait yang menangani masalah hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meyakinkan masyarakat bahwa bantuan hukum tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu, tetapi juga

bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks ini, akses terhadap bantuan hukum yang berkeadilan harus dijamin untuk menghindari disparitas akses terhadap bantuan hukum yang adil bagi masyarakat tidak mampu. Berdasarkan definisinya, bantuan hukum harus dipandang sebagai hak yang harus dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi.

1. Berperan aktif dalam masyarakat:

Menjadi bagian dari masyarakat dapat membantu mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dan Langkah – Langkah yang dapat mereka ambil untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya bantuan hukum dan cara mendapatkannya, Anda dapat membantu memperluas akses terhadap bantuan hukum di komunitas. dapat membantu meluncurkan layanan bantuan

hukum online agar bantuan hukum lebih mudah diakses¹¹.

2. Praktik Pengacara:

Sebagai klien, berhak menentukan biaya pengacara. dapat memastikan praktik biaya pengacara adil dan sesuai dengan kemampuan keuangan klien. Hal ini dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan mendapatkan bantuan hukum yang mereka perlukan. Melalui tindakan kecil, dapat membantu komunitas memperjuangkan bantuan hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Dalam masyarakat yang adil, setiap orang harus mempunyai akses yang sama terhadap keadilan dan bebas dari segala diskriminasi.

Upaya lain untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan dimulai dengan keterampilan hukum. Program keterampilan hukum dapat membantu masyarakat lebih memahami hukum dan menangani masalah hukum.

Program – program ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil atau pengacara yang bekerja secara independen. Yang kedua adalah pemberdayaan hukum. Pemberdayaan hukum dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum dengan lebih baik. Pemberdayaan hukum ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan konsultasi terkait hukum atau dengan memberikan program pelatihan kepada masyarakat. Yang Ketiga, meningkatkan akses terhadap informasi hukum. Meningkatkan akses terhadap informasi hukum dapat membantu masyarakat memahami hak – hak mereka dan mengambil keputusan yang lebih baik ketika menghadapi masalah hukum. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan akses terhadap publikasi hukum dan informasi hukum online¹². Keempat, pelayanan

¹¹ Muhlizi, Arfan Faiz. Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Non Litigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informasi Bagi Masyarakat Adat 8(1) 2013

¹² Peratran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara

pengadilan lebih terbuka dan transparan. Pelayanan pengadilan yang lebih terbuka dan transparan dapat membantu masyarakat memahami prosedur peradilan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Hal ini dapat dicapai dengan membuat informasi tentang proses pengadilan tersedia untuk umum, mempercepat proses pengadilan dan memastikan bahwa semua orang memahami keputusan pengadilan.

Memahami dan menerapkan dengan baik prinsip – prinsip administrasi peradilan yang baik dan praktik – praktik terbaik dalam tata kelola peradilan. Salah satu hal yang dapat dipelajari dalam pelatihan ini adalah bagaimana merencanakan dan mengelola beban kerja pengadilan dengan lebih baik sehingga hakim dan pegawai pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan lebih efisien. Hakim dan pejabat pengadilan juga dapat belajar bagaimana meningkatkan komunikasi antara pengadilan dan para pihak

dalam kasus mereka dan memberikan pengalaman ruang sidang yang lebih efisien dan nyaman kepada masyarakat.

Selain itu, hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan pengadilan dalam penggunaan teknologi informasi dan pengelolaan data, serta meningkatkan prosedur pengadilan yang lebih efektif. Meningkatkan efisiensi tahap uji coba, mekanisme pengambilan keputusan, mengatur waktu uji coba, dan mengatur dukungan uji coba. untuk membangun pengadilan yang dijalankan dengan cara yang lebih efisien. salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pengadilan dan mempercepat proses pengadilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung dan memfasilitasi.

Paralegal penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Namun terkadang paralegal ikut terlibat dalam permasalahan hukum sebagai tersangka atau korban. Dalam kasus

seperti ini, paralegal memerlukan pemrosesan yang cepat dan adil untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Menangani permasalahan hukum dengan paralegal harus dilakukan secara hati-hati dan tepat. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak paralegal dilindungi dan mereka diperlakukan secara adil serta tidak didiskriminasi atau dirugikan. Bantuan hukum segera tersedia. Paralegal yang terlibat dalam permasalahan hukum memerlukan pendampingan hukum sejak awal agar mereka dapat memiliki pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Seorang pengacara atau lembaga bantuan hukum dapat membantu.

Memastikan loyalitas klien paralegal tetap terjaga dengan baik. Paralegal harus menjamin kerahasiaan dan privasi klien, meskipun mereka sendiri adalah terdakwa dalam kasus tersebut atau bahkan menjadi korban dalam kasus tersebut. Mencegah diskriminasi terhadap paralegal. Kasus paralegal harus ditangani secara adil, terlepas

dari pengetahuan hukumnya atau paparánya di bidang hukum, atau visibilitas profesi paralegalnya di masyarakat sekitar. Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan paralegal. Karena paralegal adalah anggota penting dari sistem hukum, maka penting bagi mereka untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara serta bagaimana memahami dan memperjuangkan hak-hak tersebut. Menyelenggarakan pelatihan paralegal bagi pengacara dan pejabat pengadilan. Pelatihan ini harus memberikan pengetahuan tentang cara menangani kasus-kasus yang melibatkan paralegal, Kelola konflik antara mereka dan pengacaranya dan berikan panduan tentang cara menangani kasus secara efektif dan efisien. Permasalahan hukum yang melibatkan paralegal harus ditangani dengan memperhatikan hak dan kewajibannya serta harus dilakukan secara adil dan cepat. Bantuan hukum harus segera diberikan, kerahasiaan harus dijaga, dan diskriminasi harus dicegah. Pelatihan hukum dan kesadaran paralegal serta pihak-pihak terkait juga perlu ditingkatkan.

Melalui langkah-langkah tersebut, sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan dan keadilan kepada setiap orang.

Mediasi berfungsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Namun, jika ditelusuk lebih dalam, mediasi seharusnya menjadi solusi yang masuk akal terhadap permasalahan hukum di masyarakat, dibandingkan melalui pengadilan yang dianggap lebih formal dan berpotensi memicu kembali konflik sosial. Perselisihan hukum seringkali menjadi sumber permasalahan dan perselisihan antar individu atau perorangan. Kelompok. Secara tradisional, perselisihan hukum dianggap harus diselesaikan melalui proses pengadilan formal. Namun, proses peradilan terkadang memakan waktu lama, sehingga menimbulkan biaya dan tekanan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mediasi muncul dan berkembang sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah pertemuan antar individu atau kelompok dengan tujuan mencari solusi tanpa harus melalui pengadilan. Dalam mediasi,

pihak-pihak yang bersengketa berdiskusi dengan mediator biasanya orang terpilih dan terlatih untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Meskipun mediasi populer sebagai alternatif selain pengadilan, namun teknik ini belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat Indonesia. Masyarakat masih belum begitu paham dengan istilah mediasi dan cara kerjanya. Selain itu, institusi dan orang-orang yang terlatih dalam mediasi masih sulit ditemukan dan belum diketahui secara luas. Faktanya, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih cerdas dalam menyelesaikan perselisihan sosial dan hukum. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa berusaha bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Semua pihak akan saling menghormati kebutuhan dan kepentingan masing – masing serta mengupayakan solusi terbaik bagi semua pihak. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah, namun semua pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai. Saat ini, masyarakat harus lebih mempromosikan dan mendorong

mediasi. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa hukum dan permasalahan dapat dihindari melalui mediasi yang lebih besar lagi. Masyarakat membutuhkan edukasi tentang mediasi dan padangan yang lebih positif.

Selain itu, peran mediator juga sangat penting dalam mediasi. Seorang mediator tidak hanya harus mempunyai keahlian dalam menyelesaikan permasalahan hukum, namun juga harus mampu mengambil keputusan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Mediator juga tidak harus orang yang berlatar belakang hukum, namun bisa berasal dari berbagai latar belakang di wilayah tempat sengketa terjadi. Dengan cara ini, mediator dapat bekerja lebih efektif, mencapai solusi yang baik dan menghindari konflik lebih lanjut. Perlu memilih dan berpromosi secara bijak dalam menyelesaikan sengketa sosial hukum.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Paralegal memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Mereka membantu menjembatani kesenjangan hukum dengan menyediakan akses ke keadilan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara swasta.
2. Paralegal menawarkan berbagai jenis bantuan hukum, seperti memberikan konsultasi hukum, menyiapkan dokumen hukum, dan mewakili klien dalam persidangan sederhana. Mereka juga menghubungkan orang dengan advokat yang dapat memberikan bantuan hukum. Selain itu, paralegal mengadvokasi masyarakat kurang mampu dalam masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Paralegal tidak hanya terlibat dalam litigasi tetapi juga memainkan peran penting dalam hukum transaksional, hukum

perusahaan, hukum keluarga, dan hukum pidana.

3. Akses bantuan hukum merupakan hak setiap orang, namun masih banyak masyarakat yang berjuang untuk mendapatkannya karena berbagai kendala. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyediakan dana dan dukungan moral untuk memastikan bahwa bantuan hukum tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi publik tentang memperoleh bantuan hukum dan untuk mengurangi biaya mengakses bantuan hukum. Pengacara dan tenaga hukum lainnya juga perlu menyesuaikan kebijakan biaya mereka untuk mengakomodasi kemampuan ekonomi klien. Program keterampilan hukum, pemberdayaan hukum, peningkatan akses terhadap informasi hukum, dan layanan pengadilan yang lebih terbuka dan transparan sangat penting

dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan.

Saran

1. Bagi masyarakat untuk Paralegal memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat luas. paralegal yang efektif dan berpengaruh dalam membantu masyarakat tidak mampu paralegal memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum di pengadilan dan non pengadilan. Banyak masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki dana untuk membayar biaya bantuan hukum. Sebagai solusi, paralegal dapat mencari dukungan dan pembiayaan dari lembaga yang peduli dengan masyarakat tidak mampu. Selain itu, paralegal juga dapat membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan hukum ke lembaga yang menyediakan layanan ini.

2. dalam Permasalahan hukum merupakan masalah yang sering dihadapi oleh banyak masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Bentuk permasalahan hukum yang sering dihadapi seperti sengketa perdata, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini, bantuan hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak – hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan upaya penanganan bantuan hukum agar masyarakat dapat memperoleh akses terhadap hak-hak mereka. beberapa penanganan bantuan hukum untuk masyarakat dalam permasalahan hukum yang dihadapi..
- Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 11 dalam rangka perluasan akses keadilan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas”, Jakarta 2019.
- Buyung Adnan. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1982
- Denny Nurkertamanda, dadan rahmat hidayat, dan husni thamrin, 2020. Peran Lembaga bantuan hukum dan mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.
- IGN. Ridwan Widyadharma, professional hukum dalam pemberian bantuan hukum (badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2010)
- M. yahya 2000, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan, sinar grafika, Jakarta

Daftar Pustaka

Buku

Benny riyanto, “Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum

- Raharjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: ghalia Indonesia, 1983
- Sadiawati, Diani dan Achmad Santosa. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Bappenas, 2009.
- Jaka triyana dan kuncoro, A. S. 2018. Akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui Lembaga bantuan hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(3), 369 – 384
- Muhlizi, Arfan Faiz. *Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Non Litigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informasi Bagi Masyarakat Adat* 8(1) 2013

Peraturan Perundang – Undangan

Jurnal

- Hendarman supandji, 2017. Tantangan dan peran Lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal hukum & pembangunan*, 47(3), 429 – 445
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum